



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 21 Agustus 2019

Halaman: 1

2 PNS KOTA YOGYA IKUT DIAMANKAN

KPK Segel Ruang Kerja dan Laci

UMBULHARJO (MERAPI) - Ruang Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, ALH disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyelengan itu diduga terkait operasi tangkap tangan oknum jaksa dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta di Solo oleh KPK, Senin (19/8) malam. OTT itu diduga terkait Pengawasan, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D) terhadap proyek drainase di Yogyakarta.

Dari pantauan kemarin Selasa (20/8) ruang Kepala Bidang SDA dan Drainase Dinas PUPKP Kota Yogyakarta sudah disegel dengan stiker bertuliskan **DALAM PENGAWASAN KPK**. Tidak ada aktivitas pada ruang bersegel yang berada di lantai 3 Dinas PUPKP Kota Yogyakarta itu. Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bidang SDA tetap beraktivitas bekerja karena beda ruang.

"Memang benar ada satu ruang di Dinas PUPKP dalam pengawasan KPK dan satu laci disegel. Kami belum mendapatkan informasi resmi dari KPK. Kami menghormati proses hukum dan tidak ingin

**Bersambung ke halaman 9*

KPK
 mendahului KPK," kata Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti kepada wartawan, di ruang kerjanya, kemarin.

Pihaknya menghormati proses yang dilakukan oleh KPK, sehingga akan menunggu penjelasan dari lembaga itu terkait OTT oknum kejaksaan dan penyegelan ruang Kabid SDA dan Drainase Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Dia menyebut ada dua orang PNS dari Pemkot Yogyakarta yang dijemput KPK diduga karena terkait proyek OTT oknum jasa Kejaran Yogyakarta di Solo.

"Dari pihak pemkot ada dua orang rekan kami yang dimintai klarifikasi karena proyek yang terkait OTT ada di Yogyakarta," ujarnya.

Dua orang PNS yang Pemkot Yogyakarta yang diduga terkait kasus OTT KPK di Solo adalah Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas PUPKP dan Ketua Pokja Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kota Yogyakarta. Penyelengan stiker dilakukan di laci meja kerja Pokja BLP.

Dia menyatakan proyek yang diduga terkait OTT oknum kejaksaan dalam program TP4D itu adalah pembangunan saluran drainase di Jalan Dr Soepomo. Rekanan yang menangani proyek itu berada di Solo. Pemkot Yogyakarta mengalokasikan pagu anggaran Rp 10, 8 miliar untuk proyek drainase di Jalan Dr Soepomo itu.

Berdasarkan informasi di laman Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) proyek drainase di Jalan Dr Soepomo dimenangkan oleh perusahaan bernama Widoro Kandang yang beralamat di Surakarta. Setelah melalui lelang dan dimenangkan perusahaan itu nilai proyeknya Rp 8,3 miliar.

Atas kejadian itu dia mengaku prihatin karena kasus OTT oknum jasa itu terkait proyek yang masuk dalam program TP4D yang bertujuan mengawal pembangunan pemerintah agar bisa menghindari terjadinya pelanggaran Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pihaknya juga mengingatkan kepada para PNS agar tidak main-main dengan tindak pidana korupsi karena ada konsekuensi tindakan nyata. "Kami juga meminta PNS lainnya tetap tenang dan bekerja seperti biasa. Kami juga memastikan proyek-proyek fisik tetap berjalan dan terlaksana," imbuh Haryadi.

Dia menegaskan dalam pekerjaan fisik dilakukan pengawasan ketat dengan mekanisme evaluasi tiga bulan untuk melihat perkembangan realisasinya. Namun dia juga mengingatkan kepada para PNS agar tetap mengawasi pelaksanaannya walaupun sudah dikonsultasikan dan dikawal TP4D.

(Tri)-m

Tindakan

Untuk t
 Untuk t
 Jumpa

Netral Biasa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			
3. Dinas PUPKP			
4. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005